

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA SENGAWANG KECAMATAN TELUKERAMAT KABUPATEN SAMBAS

Oleh:
KARLINA^{1*}
NIM. E01112083

Dr. Lina Sunyata, M.Si², Drs. H. Agus Eka, M.Si²

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
2. Dosen Pembimbing Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

*Email : nur.alinamy1994@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai Program Keluarga Berencana di Desa Sengawang. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ada 5 yaitu : Belum optimalnya sosialisasi mengenai Program Keluarga Berencana di Desa Sengawang, tidak tersedia Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) hanya pegawai Poskesdes, Belum adanya peran kepala desa dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), Belum optimalnya jam kerja yang dilaksanakan oleh pegawai poskesdes. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Untuk menganalisis permasalahan mengenai implementasi program Keluarga Berencana di Desa Sengawang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, peneliti menggunakan teori Edward III sebagai pisau analisis yang memiliki 4 aspek yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program KB di Desa Sengawang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas masih belum optimal. Namun dari ke 4 aspek yang peneliti gunakan, masih banyak poin-poin yang belum terpenuhi baik itu pemerintah desa dan Poskesdes dalam pelaksanaan program KB seperti masih belum adanya sosialisasi mengenai program KB yang harus diadakan setiap bulan, sumberdaya manusia seperti pegawai, fasilitas juga mempengaruhi PUS untuk menggunakan KB, peran kepala desa perlu ditingkatkan dan jam kerja perlu dioptimalkan

Kata-kata kunci: Implementasi, Program KB.

THE QUALITY OF HEALTH CARE SERVICE IN LOCAL GOVERNMENT CLINIC IN MELIAU DISTRICT SANGGAU REGENCY

Abstract

The study aims explain the importance of family planning programme in Sengawang village. The study is raised from the problems that occur in the village. There are five problems found in the study; namely: less socialization about the family planning programme, no supervisors for the programme, clinic staff (poskesdes) as the ready-supervisor, fewer roles from village head and less time used by the ready-supervisor. This research used descriptive method with qualitative approach. The theory used in this research is Edward III's theory which influences the implementation of the programme, namely: communication, human resources, disposition, and biocracy. The result of study shows that the implementation of family planning programme is not optimally implemented. It was found that many there is no socialization on this programme from the village official and Poskesdes staff which should be done every month. It is suggested that the roles of Poskesdes and village staff need to be improved so that the programme will run well.

Keywords: Implementation, Family Planning Programme

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya Pemerintah mengadakan kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) dikarenakan masih banyaknya masalah yang dihadapi beberapa kabupaten terutama Kabupaten Sambas dewasa ini adalah mengurangi jumlah kemiskinan dengan menggunakan berbagai cara baik melalui peningkatan infrastruktur ekonomi seperti membangun jalan, jembatan, pasar, serta sarana lain, maupun membangun derajat dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pendidikan maupun kesehatan. Namun demikian kendala utama yang dihadapi hampir semuanya sama, yang umumnya bersumber pada permasalahan kependudukan. Adapun peraturan Pemerintahan Pusat mengenai program KB: “Undang-undang nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan bahwa Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Namun dilihat dari segi kependudukan jumlah penduduk di Desa Sengawang lumayan tinggi. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2015 sekitar 4.123 jiwa terdiri dari 2.156 jiwa laki-laki dan 1.967 jiwa perempuan, dan memiliki

jumlah Kartu Keluarga (KK) sekitar 1.087 (KK). Sedangkan tingkat kesertaan ber-KB kurang baik, dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada saat ini sekitar 387 orang, yang saat ini menjadi peserta KB yang aktif hanya sekitar 73 orang. Dari jumlah peserta KB aktif yang ada saat ini, 73 orang sedangkan yang tidak diketahui menggunakan KB sekitar 314. Dilihat dari tabel di bawah ini yang pengguna KB aktif yaitu:

Tabel 1.1
Pengguna KB yang Aktif di Desa Sengawang Tahun 2015

No	Pengguna	Jangka pendek						Jangka panjang				Jlh	%
		Pil	Ko	Su	Ip	l	h	%	Iu	M	J		
1	Aktif	10	0	6	0			100	0	0	0		100
Jlh							73				0	73	

Sumber: Poskesdes Sengawang Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas Tahun 2016

Dilihat dari tabel 1.1. masih rendahnya PUS yang menggunakan program KB. Namun sebenarnya program KB sangat baik untuk menjaga jarak kelahiran anak dan menjaga kesehatan ibu dan anak. Sedangkan dilihat dari tabel diatas masih sedikitnya PUS menggunakan KB juga sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Desa Sengawang sehingga sulitnya pemerintah untuk menjalankan program KB. Sebenarnya peran kepala desa sangat diperlukan masyarakat dalam pelaksanaan

program KB. karena kepala desa sangat penting dalam penggerak suatu pelaksana kebijakan di desa sengawang terutam dalam pelaksanaan program KB. Namun yang berperan peting dalam menggerakkan program KB di Desa Sengwang yaitu pegawai/staf yang bertugas di Pos kesehatan desa (Poskesdes) itu hanya saat ketika bersalin saja dan juga orang yang ingin menggunakan KB.

Adapun juga jam kerja yang ada diposkesdes masih sangat berpengaruh sebab jam kerja pegawai dan masyarakat masih sama-sama jamnya sehingga sulitnya PUS untuk menggunakan KB disebabkan jam kerja yang sama dengan jam kerja diposkesdes. Masih belum optimalnya jam kerja pegawai yang ada diposkesdes sehingga juga memengaruhi PUS dalam penggunaan KB. Adapun jam kerja yang idealnya ditetapkan yakni dari jam 08.00 pagi hingga jam 16.00 sore. Namun yang terjadi dilapangan hanya dari jam 08.00 pagi hingga jam 12.00 siang saja sehingga tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebenarnya jam kerja juga sangat berpengaruh dalam penggunaan KB. Sebab jam kerja yang di poskesdes sengawang masih kurang efektif karena jam kerja masyarakat dan pegawai poskesdes memiliki waktu yang sama sehingga juga mempengaruhi masyarakat dalam penggunaan KB.

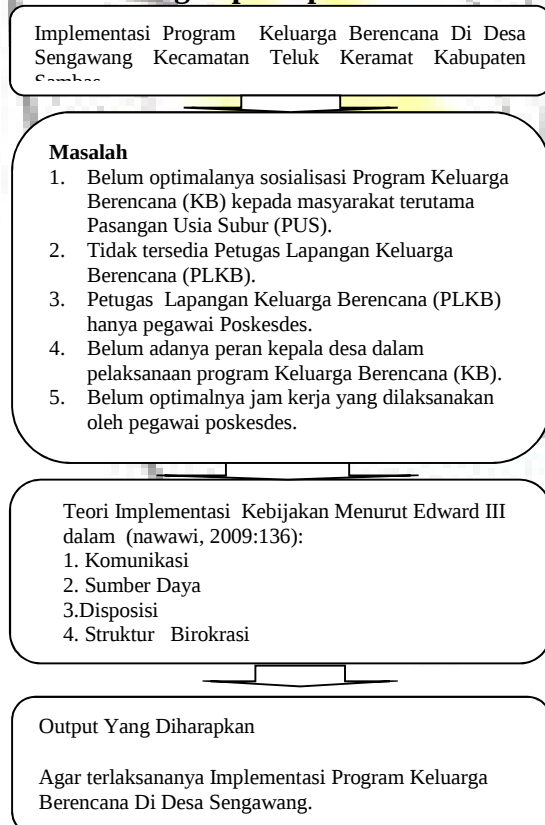
B. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk dapat menilai sejauh mana implementasi program KB yang diberikan oleh aparat pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan bagaimana proses implementasi berjalan dengan baik. Menurut George Edward III (Nawawi, 2009: 136), ada empat variable yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi, Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas.
- b. Sumber daya: Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, sumber daya manusia, material maupun metoda. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharakan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

- c. Disposisi; Suatu sikap dalam implementasi kebijakan dan karakteristik, sikap yang dimiliki implementator kebijakan yaitu seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis.
- d. Struktur birokrasi: Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Gambar 2
Kerangka pikir penelitian



C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena peneliti ingin memperoleh gambaran yang bersifat komprehensif dari permasalahan serta mendalami perkembangan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Meliau. Jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendeskripsikan “kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau”.

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan, peneliti mencari teori konsep dan definisi tentang kualitas pelayanan.
2. *Pra Research* (Pra Penelitian), digunakan untuk memastikan masalah yang akan diteliti secara empiris yang ada di lapangan (di lokasi penelitian). Yaitu peneliti mengumpulkan dan mencari informasi melalui pasien dan juga pihak internal Puskesmas.
3. Penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer dan sekunder berkenaan dengan masalah penelitian ini. Peneliti turun langsung ke tempat penelitian dalam hal ini, yaitu Puskesmas Meliau.

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Poskesdes

Sengawang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini untuk menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive*. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Poskesdes Sengawang.
2. Pegawai/staf yang bekerja di Kantor Poskesdes Sengawang.
3. Kepala Desa Sengawang
4. Pasangan Usia Subur yang ada di Desa Sengawang.

Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data di lapangan adalah : 1) Panduan Wawancara, 2) Panduan Observasi 3) Panduan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisa model interaktif menurut Moleong (2000:190) melalui tiga langkah sebagai berikut : 1) Meringkas (reduksi), 2) Memaparkan (*display*), dan 3) Menyimpulkan (verifikasi).

Adapun teknik keabsahan data yang peneliti gunakan ialah triangulasi dengan sumber yakni membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam penelitian ini keabsahan data diperoleh dengan metode triangulasi menggunakan sumber data pada.

D. HASIL PENELITIAN

Visi dari program KB adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkanlah misi program KB, yaitu “Mewujudkan pembangunan yang berawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera”.

Keberhasilan Program KB ditandai dengan:

1. Penurunan laju pertumbuhan penduduk.
2. Penurunan tingkat fertilitas.
3. Melembaga NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera).
4. Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan program KB oleh IMP, LSM, swasta, tokoh masyarakat, dan instansi pemerintah lainnya.

Program KB dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Ada macam-macam pilihan alat kontrasepsi, jika ingin menunda kehamilan hendaknya memakai kondom, pil, atau suntik. Jika ingin mengatur jarak kelahiran bisa menggunakan implant atau IUD/spiral. Dan apabila tidak ingin hamil lagi bisa menggunakan MOP/vasektomi atau MOW/tubektomi. Masing-masing alat mempunyai keunggulan dan kelemahan sendiri-sendiri, jadi pasangan usia subur

bisa memilih sesuka hati yang dianggapnya cocok dengan mereka.

Program KB di Kelurahan Jeruk pada umumnya sama dengan program KB di manapun. Perbedaan hanya terdapat pada cara pengimplementasian atau pelaksanaan-nya pada masing-masing daerah saja. Cara pengimplementasian program tersebut bergantung pada para pelaksana program dan partisipasi masyarakat daerah setempat.

Adapun dari aspek-aspek yang di kemukakan oleh Edward III;

1. Komunikasi

Dilihat dari aspek-aspek komunikasi masih dikatakan masih kurang baik, sebab masih kurangnya sosialisasi mengenai program KB. adapun tujuan Sosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program apa yang akan dilaksanakan nantinya dan apa manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat mengikuti kebijakan, peraturan, dan program yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Sumber Daya

Dilihat dari aspek sumber daya manusia masih kurangnya tenaga medis/staf yang ada diposkesdes.

dikarenakan masih kuranya peran pemerintahan desa. Sedangkan sumber daya fasilitas dilihat dari peralatan yang ada di kantor poskesdes masih banyak yang kurang terutama alat untuk menggunakan Program KB. sebenarnya sumberdaya sangat diperlukan oleh masyarakat (terutama PUS) dan juga pemerintah desa. Sebab jika tidak ada salah satu maka program KB tidak akan berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan malasnya orang untuk menggunakan KB.

3. Disposisi

Dilihat dari aspek disposisi (sikap) petugas dan masyarakat (PUS). Sikap atau peran petugas dan kepala desa sangat di perlukan masyarakat. Karena PLKB atau kepala desa merupakan ujung tombak yang sangat penting dalam penyampaian Program KB.

4. Struktur Birokrasi

Dilihat dari aspek Struktur Birokrasi masih belum sesuai dengan undang-undang. Sebab dalam pelaksanaan kebijakan Program KB masih belum sesuai dengan rencana yang di terapkan. Namun akibatnya masih tingginya tingkat kelahiran bayi di karenakan sedikitnya PUS yang mengikuti Program KB.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan mengenai implementasi program keluarga berencana di desa sengawang kecamatan teluk keramat kabupaten sambas dilihat dari aspek-aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Pelaksanaan Program KB di Desa Sengawang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas belum berjalan dengan optimal. Sebab dikarenakan masih belum adanya pelaksanaan sosialisasi atau kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan petugas mengenai program KB dikarenakan kurangnya Ketersediaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Sehingga mempengaruhi masyarakat atau PUS untuk menggunakan KB. akibatnya kebanyakan masyarakat malah tidak menggunakan KB.

2. Sumberdaya

Tidak adanya petugas lapangan keluarga berencana dan petugas lapangan juga hanya pegawai yang ada di Poskesdes. Namun juga ketersediaan fasilitas masih banyak kekurangan terutama alat untuk penggunaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. Adapun permasalahan

tersebut juga sangat mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan program KB.

3. Disposisi

Peran kepala Desa dan juga staf yang bekerja di Poskesdes masih kurang kepeduliannya terhadap masyarakat dalam pelaksanaan Program KB. Adapun pelaksanaannya hanya saat orang melahirkan dan ingin menggunakan KB saja. Namun, oleh karena itu masih kurangnya peran Kepala Desa, Staf dan PLKB.

4. Struktur Birokrasi

Sebenarnya SOP yang ada di Desa Sengawang terutama di Poskesdes yang masih kurang disiplinnya jam kerja yang seharusnya dari jam 08.00-16.00 yang diterapkan oleh Pemerintah tetapi yang dilaksanakan oleh pegawai di Poskesdes hanya dari jam 08.00-12.00 saja. Dilihat dari sisi jam kerja yang ada poskesdes juga sangat mempengaruhi masyarakat dalam penggunaan KB. karena belum optimalnya jam kerja juga berpengaruh

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti akan memberikan beberapa saran untuk

poskesdes sengawang dalam memberikan program KB. Adapun saran yang ingin disampaikan peneliti berdasarkan aspek-aspek adalah sebagai berikut:

1. Implementasi program KB di Desa Sengawang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, perlu adanya sosialisasi khusus tentang program KB baik itu suntik KB, Pil KB, MKJP maupun lainnya yang terkait dengan program KB sehingga mereka mengetahui manfaat dan tujuan dari program KB tersebut.
2. Perlu adanya peningkatan petugas dan fasilitas yang ada di poskesdes dan PLKB sehingga program KB bisa berjalan dengan baik.
3. Perlu adanya peranan kepala desa, staf dan PLKB dalam penggerakan atau melaksanakan program KB. sehingga program KB bisa berjalan dengan baik.
4. Perlu adanya peningkatan jam kerja yang ada di Poskesdes. Adapun saat ini jam kerja yang ada di poskesdes yang terbilang dari jam 08.00-12.00 seharusnya di tingkatkan lagi dari jam 08.00-16.00.

G. REFERENSI

Buku

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas
- Abdul, Solichin Wahab. 2005. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*: AIPI Bandung.
- Awang Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badjuri dan Yuwono Teguh. 2000. *Kebijakan Publik, Konsep Dan Strategi*. Semarang: UNDIP.
- Badjuri dan Yuwono Teguh. 2003. *Kebijakan Publik, Konsep Dan Strategi*. Semarang: UNDIP.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*. Yogyakarta: Fisipol Universitas Gajah Mada.
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. New Jersey: prentice Hall.
- Islamy, M.Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jones, Charles o. 1994. *An Introduction To The Study Of Public Policy*. North Scituate Massachusetts: Dux Bury Press.
- Moleong, J. Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Sursbaya : PTS Press.

Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Lembaga penerbit Gajahmada University Press.

Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Widodo, Joko. 2008. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijan Publik*. Malang: Bayu Media.

Widodo, Joko. 2012. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijan Publik*. Malang: Bayu Media.

Sumber Lain

.....2016. *renstra_bp3akb*. Internet.

Pramithasari, Anindya Wayan. 2013. *Implementasi Program Keluarga Berencana (Kb) Di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negri Surabaya.

Perda No. 28 pereraturan BKKBN Tahun 2012.

Polindes. 2015. *Pengguna KB Dan Angka Kelahiran Bayi Dan Angka Kematian Ibu: Tingkat Desa sengawang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas*.

Profil Desa Sengawang 2015.

Wahyuningsih, Sri. 2009. *Program Keluarga Berencana*. Makalah ilmiah



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Karlina
NIM / Periode lulus : E0112083 / IV
Tanggal Lulus : 7 Juli 2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP / IA
Program Studi : IAH
E-mail address/ HIP : Nur Alinamy.1994@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1),
menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi (*) pada
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah
saya yang berjudul (**):

Implementasi Program Keluarga Berencana Di Desa 3
Sungaiwang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola
Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data
(database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltext*

☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk
tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui

Pengelola Jurnal

Pardi, S. Sos, M. AB
NIP. 1312035 200214 1003

Capaian

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publik Governance Aspirasi Sociodem Sociologique*)

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 11-8-2017

Karlina
NIM. E0112083

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan
dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission
author)